

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Pengusaha Digital pada Sektor Ekonomi Kreatif



Dodo Waluyo ^{a,1*}, Melinda Hasanah ^{a,2}, Irsad Anggriawan ^{a,3}

^a Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

^b Program Studi Bisnis Digital, Universitas Nusa Mandiri, Indonesia

^c Program Studi Manajemen, Universitas Islam Bandung, Indonesia

¹ waluyoyododo@gmail.com *; ² hasanahmelll@gmail.com; ³ irsadanggi@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pengusaha digital pada sektor ekonomi kreatif. Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk usaha kreatif berbasis teknologi, seperti startup digital, content creator, digital marketing, dan UMKM berbasis platform digital. Namun, pengembangan ekonomi kreatif digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, akses pembiayaan yang terbatas, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan internasional, buku, repository ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan ekonomi kreatif dan transformasi digital. Teknik analisis data menggunakan analisis isi melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan partisipasi pengusaha digital melalui pembangunan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital, pemberian insentif usaha, pengembangan inkubator bisnis, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Selain itu, regulasi yang adaptif dan perlindungan hukum terhadap karya kreatif juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif digital sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2026-04-29

Revised 2026-05-10

Accepted 2026-05-25

Published 2026-05-31

Keywords

kebijakan pemerintah, pengusaha digital, ekonomi kreatif, transformasi digital, kewirausahaan digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi kreatif. Transformasi digital yang berlangsung secara cepat mendorong lahirnya berbagai model usaha baru berbasis teknologi, seperti startup digital, perdagangan elektronik, industri konten digital, digital marketing, hingga berbagai bentuk usaha kreatif berbasis media sosial. Perubahan tersebut menciptakan peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara lebih fleksibel, inovatif, dan kompetitif. Dalam konteks global, ekonomi kreatif dipandang sebagai salah satu sektor strategis yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing suatu negara di era digital. Zhao dan Jiang (2024) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan industri kreatif melalui peningkatan efisiensi inovasi dan produktivitas usaha. Selain itu, Martial et al. (2024) menyatakan bahwa ekonomi kreatif berbasis digital mampu menjadi

penggerak pertumbuhan ekonomi modern karena didukung oleh kreativitas, teknologi, dan inovasi yang terus berkembang.

Perkembangan ekonomi kreatif digital juga didorong oleh meningkatnya penggunaan internet dan teknologi komunikasi di berbagai negara. Masyarakat kini dapat memasarkan produk dan jasa secara lebih luas melalui platform digital tanpa harus bergantung pada model bisnis konvensional. Nurse (n.d.) menjelaskan bahwa ekonomi kreatif digital membuka peluang besar bagi negara berkembang untuk meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Mallikarjun (2025) yang menyatakan bahwa transformasi digital telah menciptakan peluang baru bagi startup dan kewirausahaan digital melalui dukungan inovasi dan pengembangan teknologi. Dengan demikian, ekonomi kreatif berbasis digital tidak hanya menjadi bagian dari perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan global.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi kreatif digital menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran startup digital, UMKM berbasis platform digital, content creator, serta berbagai usaha kreatif berbasis media sosial menunjukkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber ekonomi baru. Perkembangan tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna internet dan tingginya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, terutama generasi milenial dan Generasi Z. Indiahono (2022) menjelaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif digital karena memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan teknologi dan tren pasar. Selain itu, Judijanto (2024) menjelaskan bahwa perkembangan startup digital di Indonesia semakin meningkat seiring dengan terbukanya peluang inovasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital.

Meningkatnya partisipasi pengusaha digital dalam ekonomi kreatif juga dipengaruhi oleh kemudahan akses teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pengusaha kini dapat memanfaatkan media sosial, marketplace, aplikasi digital, dan berbagai platform daring untuk memperluas pasar serta meningkatkan efisiensi usaha. Abudaqa dan Noburu (2024) menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor pendidikan, dan sektor swasta sangat penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital, terutama dalam meningkatkan akses teknologi dan literasi digital masyarakat. Selain itu, Jia Yi et al. (2025) menemukan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk hibah dan insentif mampu meningkatkan produktivitas pelaku industri konten digital serta memperkuat kegiatan inovasi dan penelitian pada sektor ekonomi kreatif.

Meskipun perkembangan ekonomi kreatif digital menunjukkan tren positif, pengusaha digital masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan infrastruktur digital di berbagai wilayah. Tidak seluruh daerah memiliki akses internet dan fasilitas teknologi yang memadai sehingga perkembangan ekonomi digital masih terpusat di wilayah perkotaan. Aziz dan Budiatri (2024) menjelaskan bahwa program digitalisasi ekonomi di Indonesia masih menghadapi hambatan berupa ketimpangan akses teknologi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan data terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses pasar digital dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

Selain keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Banyak

pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi digital secara efektif, baik dalam pemasaran, pengelolaan data, maupun pengembangan produk berbasis teknologi. Wibowo et al. (2024) menjelaskan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif digital di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan ekonomi digital global.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya perlindungan hukum terhadap karya kreatif, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Mohamed (2024) menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia masih membutuhkan reformasi kebijakan, terutama dalam aspek perlindungan hak cipta, koordinasi kelembagaan, dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif. Sementara itu, Barricelli dan Pedone (2024) menjelaskan bahwa dukungan regulasi dan kebijakan publik sangat penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengusaha digital. Tanpa adanya kebijakan yang mendukung, pengusaha digital akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan inovasi dan mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, akselerator, dan kolaborator dalam pengembangan ekonomi kreatif digital. Pemerintah tidak hanya bertugas menyusun regulasi, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat. Dellyana et al. (2023) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan ekonomi kreatif digital melalui strategi governance yang adaptif dan kolaboratif. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital, penyediaan inkubator bisnis, pemberian hibah startup, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif digital. Bangsawan (2023) menjelaskan bahwa transformasi digital nasional menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekonomi kreatif di Indonesia. Program transformasi digital tersebut mencakup pembangunan infrastruktur teknologi, penguatan literasi digital masyarakat, serta peningkatan akses teknologi bagi pelaku usaha kreatif. Selain itu, berbagai pemerintah daerah juga mulai aktif mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pengusaha digital di wilayah masing-masing.

Sihombing et al. (2024) menemukan bahwa Pemerintah Sumatera Utara berhasil meningkatkan partisipasi pengusaha digital melalui pelatihan, perlindungan hukum, dan pengembangan ekosistem digital. Program tersebut mendorong peningkatan inovasi dan daya saing usaha kreatif masyarakat. Patria dan Suwarta (2024) juga menjelaskan bahwa Pemerintah DKI Jakarta melakukan inovasi kebijakan publik dengan membangun ruang kreatif dan fasilitas pendukung ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan peluang kerja dan kualitas produk kreatif masyarakat. Sementara itu, Munfaqiroh (2023) menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang mendukung UKM kreatif melalui pelatihan digital marketing dan pengembangan fasilitas inkubasi bisnis.

Di tingkat internasional, berbagai negara juga menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan ekonomi kreatif digital melalui kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi dan kewirausahaan. Rodigina dan Sinilova (2025) menjelaskan bahwa negara-negara Asia Tenggara meningkatkan partisipasi pengusaha digital melalui hibah startup, insentif

pajak, dan kerja sama internasional. Sharma dan Goyal (2024) juga menemukan bahwa kebijakan startup di Rajasthan berhasil meningkatkan inovasi dan akses sumber daya bagi pengusaha digital melalui penyederhanaan regulasi dan pembangunan infrastruktur digital. Selain itu, Emmendoerfer et al. (2021) menjelaskan bahwa kebijakan publik yang mendukung ekonomi kreatif dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kebijakan pemerintah dan ekonomi kreatif digital, sebagian besar penelitian masih berfokus pada transformasi digital secara umum, pengembangan startup, atau inovasi pemasaran digital tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara kebijakan pemerintah dan partisipasi pengusaha digital. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak menggunakan pendekatan konseptual dan literature review sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif digital yang berkelanjutan. *Analysing Public Policies for the Creative Economy (2024)* menjelaskan bahwa penelitian terkait kebijakan ekonomi kreatif masih membutuhkan pengembangan model kebijakan yang lebih integratif dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji peran kebijakan pemerintah secara lebih komprehensif melalui berbagai dimensi, seperti regulasi, pembangunan infrastruktur digital, literasi digital, pembiayaan usaha, perlindungan hak cipta, inkubasi bisnis, dan kolaborasi publik-swasta dalam meningkatkan partisipasi pengusaha digital pada sektor ekonomi kreatif. Penelitian ini juga menempatkan pengusaha digital sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi kreatif sehingga fokus kajian tidak hanya pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada dampak kebijakan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital.

Penelitian ini penting dilakukan karena ekonomi kreatif digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di era globalisasi digital. Dengan memahami peran kebijakan pemerintah secara lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan ekonomi kreatif yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan strategi pengembangan kewirausahaan digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur atau library research. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pengusaha digital pada sektor ekonomi kreatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena sosial, kebijakan publik, dan hubungan antarvariabel secara lebih komprehensif melalui interpretasi terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Metode studi literatur digunakan karena penelitian berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan ekonomi kreatif digital, kewirausahaan digital, dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku, repository ilmiah,

working paper, serta dokumen kebijakan terkait transformasi digital dan ekonomi kreatif. Seluruh referensi yang digunakan berasal dari sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang membahas kebijakan pemerintah, startup digital, kewirausahaan digital, transformasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif. Referensi utama yang digunakan antara lain penelitian Dellyana et al. (2023), Sihombing et al. (2024), Aziz dan Budiatri (2024), Wibowo et al. (2024), Martial et al. (2024), Rodigina dan Sinilova (2025), Sharma dan Goyal (2024), Zhao dan Jiang (2024), serta berbagai penelitian lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai artikel ilmiah dan dokumen kebijakan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Peneliti kemudian melakukan seleksi sumber berdasarkan kualitas publikasi, relevansi tema, tahun terbit, serta kesesuaian isi dengan fokus kajian penelitian. Literatur yang dipilih berasal dari jurnal bereputasi, buku akademik, repository ilmiah, dan dokumen resmi yang membahas perkembangan ekonomi kreatif digital dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pengusaha digital.

Setelah proses seleksi dilakukan, peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu, seperti pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, akses pembiayaan, inkubasi bisnis, perlindungan hak cipta, regulasi startup, dan kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta maupun lembaga pendidikan. Pengelompokan data dilakukan untuk mempermudah proses analisis serta mengidentifikasi hubungan antara kebijakan pemerintah dan peningkatan partisipasi pengusaha digital pada sektor ekonomi kreatif. Peneliti juga mengklasifikasikan data berdasarkan konteks wilayah dan negara untuk membandingkan implementasi kebijakan di berbagai daerah dan negara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi atau content analysis. Analisis isi digunakan untuk memahami pola, hubungan, dan makna dari berbagai informasi yang terdapat dalam sumber literatur. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan menghilangkan data yang tidak berkaitan langsung dengan topik kajian. Tahap berikutnya adalah kategorisasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema dan indikator tertentu agar mempermudah interpretasi dan pembahasan.

Tahap interpretasi data dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antara kebijakan pemerintah dan peningkatan partisipasi pengusaha digital dalam sektor ekonomi kreatif. Peneliti mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi perkembangan startup digital, UMKM kreatif, pemasaran digital, dan inovasi berbasis teknologi. Selain itu, peneliti juga menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan, seperti ketimpangan akses teknologi, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil dan temuan dari berbagai literatur yang memiliki fokus kajian serupa. Validitas penelitian juga diperkuat melalui penggunaan berbagai sumber ilmiah yang berasal dari jurnal bereputasi dan publikasi akademik terpercaya. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pengusaha digital pada sektor ekonomi kreatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi digital telah menciptakan perubahan besar dalam struktur ekonomi global maupun nasional. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi pola konsumsi masyarakat, tetapi juga mendorong transformasi dalam sistem produksi, distribusi, dan pemasaran berbagai produk kreatif. Kemajuan teknologi digital melahirkan berbagai bentuk usaha baru berbasis inovasi, seperti startup digital, content creator, digital marketing agency, marketplace, serta UMKM berbasis platform digital. Dalam konteks ini, ekonomi kreatif berkembang menjadi sektor strategis yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat partisipasi pengusaha digital pada sektor ekonomi kreatif melalui berbagai bentuk dukungan kebijakan, pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan ekosistem usaha yang kondusif.

Berdasarkan hasil analisis literatur, salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya partisipasi pengusaha digital adalah transformasi digital yang semakin masif dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan internet, media sosial, dan teknologi komunikasi telah mengubah pola bisnis tradisional menjadi lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Zhao dan Jiang (2024) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi inovasi dalam industri kreatif sehingga mendorong pertumbuhan usaha kreatif berbasis teknologi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha tanpa harus memiliki modal fisik yang besar seperti pada model bisnis konvensional.

Perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi digital juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan kewirausahaan digital. Pengusaha kini dapat memasarkan produk dan jasa secara lebih luas melalui marketplace, media sosial, dan berbagai aplikasi digital. Fenomena ini mendorong munculnya banyak pelaku usaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perkembangan teknologi. Indiahono (2022) menjelaskan bahwa generasi milenial dan Generasi Z memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi kreatif digital karena lebih terbuka terhadap inovasi dan penggunaan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi generasi muda dalam ekonomi kreatif tidak terlepas dari kemudahan akses informasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.

Namun demikian, perkembangan ekonomi kreatif digital tidak terjadi secara otomatis tanpa dukungan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan pengusaha digital. Peran tersebut terlihat melalui kebijakan pembangunan infrastruktur digital, penyediaan akses teknologi, pemberian pelatihan kewirausahaan digital, penguatan regulasi, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha kreatif. Dellyana et al. (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif digital sangat dipengaruhi oleh strategi governance pemerintah dalam membangun sistem yang adaptif dan kolaboratif. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan peluang inovasi bagi masyarakat.

Salah satu bentuk peran pemerintah yang paling dominan adalah pembangunan infrastruktur digital. Infrastruktur digital menjadi fondasi utama dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi karena menentukan akses masyarakat terhadap internet dan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki

infrastruktur digital yang baik cenderung memiliki tingkat partisipasi pengusaha digital yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Aziz dan Budiatri (2024) menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses teknologi dan infrastruktur digital antarwilayah. Ketimpangan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, belum mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital secara optimal.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut melalui program transformasi digital nasional. Program tersebut mencakup pembangunan jaringan internet, peningkatan akses teknologi, serta penguatan sistem komunikasi digital di berbagai daerah. Bangsawan (2023) menjelaskan bahwa kebijakan akselerasi transformasi digital menjadi strategi penting pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Melalui pembangunan infrastruktur digital, pemerintah berupaya menciptakan pemerataan akses teknologi agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan startup digital, UMKM berbasis platform digital, dan industri kreatif berbasis media sosial.

Selain pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pengusaha digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan teknologi. Wibowo et al. (2024) menjelaskan bahwa rendahnya literasi digital menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai program pelatihan dan pendidikan digital untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai program pelatihan digital yang dilakukan pemerintah terbukti mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha berbasis teknologi. Pelatihan tersebut meliputi penggunaan media sosial untuk pemasaran, pengelolaan marketplace, pengembangan konten digital, hingga pengelolaan keuangan digital. Munfaqiroh (2023) menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang berhasil meningkatkan kemampuan digital marketing pelaku UMKM kreatif melalui program pelatihan dan inkubasi bisnis. Program tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan pemasaran digital, tetapi juga memperluas jaringan usaha dan meningkatkan daya saing produk kreatif lokal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan insentif dan akses pembiayaan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan pengusaha digital. Banyak pelaku usaha kreatif menghadapi kendala modal dalam mengembangkan usaha mereka, terutama startup digital dan UMKM berbasis teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan skema pembiayaan yang mendukung pengembangan usaha kreatif digital. Jia Yi et al. (2025) menjelaskan bahwa hibah dan insentif pemerintah di Malaysia berhasil meningkatkan produktivitas pelaku industri konten digital serta memperkuat inovasi dalam ekonomi kreatif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan finansial dari pemerintah mampu meningkatkan keberlanjutan usaha dan mendorong lahirnya inovasi baru dalam ekonomi digital.

Di Indonesia, dukungan pembiayaan terhadap startup digital dan UMKM kreatif mulai berkembang melalui berbagai program bantuan pemerintah dan kerja sama dengan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang mudah dapat meningkatkan keberanian masyarakat untuk memulai usaha berbasis teknologi. Selain itu, keberadaan inkubator bisnis dan pusat inovasi juga membantu pengusaha digital dalam

mengembangkan ide usaha menjadi bisnis yang lebih kompetitif. Patria dan Suwarta (2024) menjelaskan bahwa Pemerintah DKI Jakarta membangun ruang kreatif dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat. Program tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan pengembangan usaha kreatif berbasis digital.

Dalam konteks regulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap partisipasi pengusaha digital. Regulasi yang terlalu rumit dan birokrasi yang panjang dapat menghambat pertumbuhan usaha kreatif berbasis teknologi. Sharma dan Goyal (2024) menjelaskan bahwa kebijakan startup di Rajasthan berhasil meningkatkan inovasi dan akses sumber daya melalui penyederhanaan regulasi dan penguatan infrastruktur digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang sederhana dan fleksibel dapat meningkatkan minat masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi kreatif digital.

Selain regulasi usaha, perlindungan hukum terhadap karya kreatif juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha kreatif menghadapi risiko pembajakan karya dan pelanggaran hak cipta di ruang digital. Mohamed (2024) menjelaskan bahwa penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi kebijakan ekonomi kreatif di Indonesia. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pengusaha digital akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan usaha dan nilai ekonomi dari karya kreatif mereka.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam membangun kolaborasi antara sektor publik, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif digital membutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan. Abudaqa dan Noburu (2024) menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta mampu meningkatkan literasi digital, akses teknologi, dan pengembangan kewirausahaan digital. Kolaborasi tersebut memungkinkan terciptanya transfer pengetahuan, pengembangan inovasi, dan peningkatan akses pasar bagi pengusaha digital.

Di tingkat daerah, implementasi kebijakan pemerintah menunjukkan hasil yang cukup beragam. Sihombing et al. (2024) menemukan bahwa Pemerintah Sumatera Utara berhasil meningkatkan partisipasi pengusaha digital melalui pelatihan, pengembangan ekosistem digital, dan perlindungan hukum terhadap usaha kreatif masyarakat. Program tersebut meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal serta memperluas akses pasar digital. Sementara itu, beberapa daerah lain masih menghadapi keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan koordinasi kelembagaan dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi kreatif digital tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal negara, tetapi juga oleh dinamika globalisasi dan perkembangan ekonomi digital internasional. Rodigina dan Sinilova (2025) menjelaskan bahwa negara-negara Asia Tenggara meningkatkan daya saing ekonomi kreatif melalui kerja sama internasional, hibah startup, dan pengembangan pusat kreatif berbasis teknologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif digital membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi domestik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan persaingan ekonomi global.

Meskipun berbagai kebijakan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pengusaha digital, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan infrastruktur

digital, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum meratanya akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat menyebabkan kebijakan pemerintah sering kali tertinggal dibandingkan perubahan kebutuhan masyarakat dan pasar digital.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif digital sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu membangun kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, perlindungan hukum, serta pengembangan kolaborasi antaraktor ekonomi kreatif. Dengan kebijakan yang tepat, ekonomi kreatif digital dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di era globalisasi digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan partisipasi pengusaha digital dalam sektor ekonomi kreatif. Kebijakan yang mendukung infrastruktur digital, literasi digital, akses pembiayaan, perlindungan hak cipta, dan kolaborasi lintas sektor mampu menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif digital membutuhkan komitmen pemerintah yang konsisten agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pengusaha digital pada sektor ekonomi kreatif. Peran tersebut terlihat melalui berbagai bentuk dukungan, seperti pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, penyediaan akses pembiayaan, pemberian insentif usaha, pengembangan inkubator bisnis, serta penyusunan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan mampu menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif sehingga pengusaha digital memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, berinovasi, dan meningkatkan daya saing usaha mereka di era digital.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi kreatif digital tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan kolaboratif. Dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terbukti mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses pasar digital, serta memperkuat kemampuan pengusaha dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan ekonomi kreatif. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas kreatif menjadi faktor penting dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi kreatif digital.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap karya kreatif digital. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif digital membutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif digital sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menciptakan

kebijakan yang mendukung inovasi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, sektor ekonomi kreatif digital berpotensi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudaqa, A., & Noburu, I. (2024). *Optimizing digipreneurship in the growth of the digital millennial creative economy ecosystem*. *Startupreneur Business Digital*, 4(1). <https://doi.org/10.33050/sabda.v4i1.681>
- Aziz, N. L. L., & Budiatri, A. P. (2024). The role of government in facilitating digital economy for micro, small, and medium enterprises. In *Digital transformation and economic development*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-97-0029-5_7
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan akselerasi transformasi digital di Indonesia: Peluang dan tantangan untuk pengembangan ekonomi kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Barricelli, D., & Pedone, A. (2024). *Politiche di sostegno alla creazione di nuova impresa e accompagnamento allo start-up: Analisi della normativa e delle misure nazionali e regionali*. INAPP Working Paper. https://doi.org/10.53223/inappwp_2024-115
- Dellyana, D., Arina, N., & Fauzan, T. R. (2023). Digital innovative governance of the Indonesian creative economy: A governmental perspective. *Sustainability*, 15(23), 16234. <https://doi.org/10.3390/su152316234>
- Emmendoerfer, M. L. (2022). *Entrepreneurship in public policies in the context of Brazilian creative economy*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6878925>
- Indiahono, D. (2022). Designing policies to stimulate the digital creative economy for millennials and Generation Z. *KnE Social Sciences*, 7(9), 84–95. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10929>
- Jia Yi, A. K., Isa, M., & Yusof, N. (2025). Impact of government incentives on digital content creators in Malaysia: An empirical study. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 62(1), 1–18. <https://doi.org/10.22452/mjes.vol62no1.1>
- Judijanto, L. (2024). Perkembangan startup digital di Indonesia: Sebuah tinjauan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5). <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i5.1875>
- Mallikarjun, A. (2025). *Digital economy 2047: Transforming India through startups and innovation*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17307392>
- Martial, T., Arief, T., Pasha, P., et al. (2024). *Creative economy as a driver of economic growth in the digital era*. <https://doi.org/10.62872/t2w8cy65>
- Mohamed, S. (2024). Bridging policy and practice: Reforming Indonesia's creative economy framework for music and visual arts. *Harmonia*, 2(1). <https://doi.org/10.61978/harmonia.v2i1.1020>
- Munfaqiroh, S. (2023). Peran pemerintah Kota Malang dalam membangun inovasi digital marketing UKM industri kreatif kriya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(1), 183–192. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1830>
- Nurse, K. (n.d.). *The digital creative economy and trade: Strategic options for developing countries*. <https://doi.org/10.30875/e6f5ce31-en>

-
- Patria, Y. M., & Suwarta, F. (2024). Inovasi kebijakan publik pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 10(2), 145–156. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v10i2.3610>
- Rodigina, N. J., & Sinilova, A. V. (2025). Strategies for the development of creative economy in Southeast Asian countries: Experience of public policy and international cooperation. *Mezhdunarodnaya Ekonomika*. <https://doi.org/10.33920/vne-04-2508-04>
- Sharma, D., & Goyal, R. (2024). A review on unveiling the impact of government policies on Rajasthan's startup ecosystem. *Journal of Statistics and Management Systems*. <https://doi.org/10.47974/jsms-1286>
- Sihombing, J. A., Manalu, R. H. R., & Manik, E. F. (2024). Analisis peran pemerintah sebagai salah satu aktor penggerak ekonomi kreatif di Sumatera Utara. *Economic Reviews Journal*.
- Wibowo, N. A. A., Wahyudi, E. J., Ismawati, L., et al. (2024). Opportunities and challenges of digital transformation for creative economy development: Study literature review. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(1). <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.569>
- Zhao, X., & Jiang, Z. (2024). The impact of the digital economy on creative industries development: Empirical evidence based on China. *PLOS ONE*, 19(3), e0299232. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299232>